

# PERAN WIDYAISWARA UNTUK MENGATASI PROBLEM GURU DALAM PENYUSUNAN IPK

## *THE ROLE OF WIDYAISWARA IN OVERCOMING TEACHER'S PROBLEM IN CON- STRUCTING THE COMPETENCY ACHIEVEMENT INDICATOR (CAI)*

**T h o h a r i**

Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya  
thoharimoe@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Effective learning has three main stages, namely [1] the planning, this stage contains the competency targets that will be achieved by students in the form of KI and KD, [2] the implementation stage of learning, which contains the model and method of learning, and [3] the assessment phase, it measure the students' achievement of target competencies. The competency target in the form of KI - KD at the planning stage cannot be measured and assessed if it has not been broken down into the Competency Achievement Indicator (CAI). Unfortunately, the teachers are still having difficulties in deciding the CAI. There are also a lot of problems of the teacher to construct the CAI. The problem of teachers in the preparation of the GPA certainly has an effect on the learning and assessment process. Because the CAI contains certain competency and material that must be achieved. If the CAI in the form of an operational verb is not correct, the material can be incorrect, the learning model is not appropriate, the method will not be appropriate as well. It is the duty and responsibility of Widyaiswara to carry out a thorough and continuous enlightenment to the teachers when there are training related to learning. It also needs to make the problem of the preparation of this CAI as a more massive and intensive training program.*

*Keywords* : problems, competency achievement indicators (CAI), widyaiswara

### **ABSTRAK**

Pembelajaran yang efektif itu ada tiga tahap utama yaitu [1] tahap perencanaan yang berisi target kompetensi yang mau dikuasakan kepada peserta didik berupa KI dan KD, (2) tahap pelaksanaan pembelajaran yang berisi model dan metode pembelaran, dan [3]) tahap penilaian yang berisi kegiatan mengukur ketercapaian target kompetensi. Target kompetensi yang berupa KI – KD pada tahap perencanaan belum bisa diukur dan dinilai jika belum diturunkan ke dalam Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Fakta di lapangan para guru masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun IPK. Ada banyak faktor penyebab problema guru menyusun IPK. Juga banyak bentuk problema guru menyusun IPK. Problema guru dalam penyusunan IPK ini tentunya berefek terhadap proses pembelajaran dan penilaiannya. Karena IPK mengandung muatan kompetensi dan materi tertentu. Jika IPK yang berupa kata kerja operasionalnya tidak tepat maka materinya bisa tidak tepat, model pembelajarannya tidak pas, juga metodenya tidak tepat. Problema guru dalam penyusunan IPK ini harus menjadi perhatian oleh para widyaiswara dalam kegiatan kediklatan. Artinya, menjadi tugas dan tanggung jawab widyaiswara untuk melakukan pencerahan secara mantab dan terus menerus terhadap para guru ketika ada diklat yang berkaitan dengan pembelajaran. Juga perlu menjadikan problema penyusunan IPK ini sebagai program diklat yang lebih massif dan intensif.

**Kata kunci** : problema, indikator pencapaian kompetensi (IPK), peran widyaiswara

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jika disederhanakan hanya ada tiga tahapan utama dalam proses pembelajaran yaitu [1] tahap perencanaan yang berisi target kompetensi Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), [2] tahap pelaksanaan berupa proses pembelajaran dengan berbagai model dan metode pembelajaran, dan [3] tahap penilaian sebagai alat untuk menguji ketercapaian target kompetensi. Meskipun hanya tiga tahapan, namun banyak guru yang masih belum mampu menguasai permasalahan ini. Guru lazimnya langsung focus dan sibuk menyampaikan materi pelajaran tanpa memperhatikan apa sebenarnya kompetensi yang mau dikuasakan kepada peserta didik sebagai target kompetensinya.

Bahkan tidak jarang guru bias dalam memahami ranah kompetensi yang digariskan oleh kurikulum. Guru gagal paham tentang apa itu kompetensi sikap, apa itu kompetensi pengetahuan, dan apa itu kompetensi keterampilan. Lagi-lagi guru lebih sibuk kepada kegiatan proses menyampaikan materi pelajaran. Ketidakhahaman terhadap ketiga ranah kompetensi tersebut nampak saat guru mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan tentang masing-masing ranah kompetensi tersebut. Biasanya pemahaman tentang konsep terhadap tiga ranah kompetensi pada akhirnya akan berujung rancunya proses penilaian masing-masing ranah kompetensi.

Lemahnya kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya yaitu Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) juga tidak lepas dari fakta di lapangan bahwa banyaknya urusan guru di sekolah yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Beban urusan yang banyak semisal urusan kegiatan berbagai ekstra kurikuler, urusan PPDB, urusan lomba-lomba, urusan kemasyarakatan (PKK, KPPS, HUT RI, dan lain-lain), dan sebagainya jelas menyita

pikiran guru. Ujung-ujungnya guru kehabisan waktu luang untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran secara maksimal. Ibaratnya, tak ada ruang berfikir yang cukup untuk mempersiapkan pembelajaran secara maksimal. Jadinya, fisiknya lelah atau penat dan fikiran penuh. Tak sempat ber-pikir dan tak terbiasa berpikir. Efeknya, kompetensi menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ikut melemah.

Namun bisa jadi, luangnya waktu yang cukup tidak serta merta membuat guru mampu menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) jika jiwa guru tidak memiliki etos yang memadai. Rasanya bukan isapan jempol jika dikatakan bahwa guru di negeri ini lebih menyukai budaya rileks, santai, dan hal-hal yang tidak membutuhkan kegiatan berpikir. Tapi kebiasaan ini tidak murni milik para guru saja tetapi hampir merambah semua warga masyarakat. Padahal kegiatan menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) tak bisa dipungkiri membutuhkan pemikiran yang lumayan tinggi. Kegiatan menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) perlu latihan berpikir yang berulang-ulang dengan pencermatan berpikir yang bagus. Jika tidak terbiasa berpikir di- tambah etos kerja yang tinggi maka rasa lelah dan malas selalu akan menghantui.

Efek dari tidak terbiasa berpikir dan rendahnya etos kerja tersebut adalah muncul kesulitan memahami dan menafsirkan kata kerja operasional (KKO) untuk masing-masing ranah. Akhirnya guru merasa lelah untuk berfikir menemukan KKO yang harus diterapkan dalam indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang akhirnya menyerah. Menyerah ini dalam arti kata bahwa guru akhirnya tidak menggunakan KKO dengan tepat. Perlu diketahui bahwa baik ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu memiliki tingkatan masing-masing.

Demikian beberapa hal yang menjadi latar

belakang munculnya problem bagi guru berkaitan dengan kompetensi menyusun IPK. Problem disini dimaknakan lemahnya kompetensi guru khususnya yang berkaitan dengan kegiatan menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Tulisan ini akan mengupas tentang problem tersebut sekaligus peran apa yang perlu dilakukan oleh para widyaiswara ketika melaksanakan proses kediklatan bagi guru.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari tulisan ini maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : [1] Apa problema guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Apa efek dari problema menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK). [3] Bagaimana peran widyaiswara untuk mengatasi problema guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK).

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : [1] Menguraikan problema apa saja yang dialami oleh para guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Menjelaskan efek apa saja yang ditimbulkan dari problema menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK). [3] Menguraikan peran widyaiswara untuk mengatasi problema guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi (IPK).

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut : [1] Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan konsep-konsep ilmu pada program lembaga kediklatan, khususnya tentang pengembangan kompetensi penyusunan indicator pencapaian kompetensi (IPK). [2] Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran : [a] Bagi para guru bisa digunakan untuk lebih memperdalam penguasaan masalah penyusunan indikator pencapaian kompetensi

(IPK). Hal ini karena kegagalan dalam penguasaan masalah penyusunan indikator pencapaian kompetensi (IPK) ini bisa berakibat fatal pada proses pembelajaran dan penilaiannya. [b] Bagi para widyaiswara bisa digunakan untuk lebih peduli terhadap kompetensi penyusunan indikator pencapaian kompetensi (IPK) agar guru-guru mendapat pencerahan yang tepat demi pembelajaran bagi peserta didiknya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsepsi Problema**

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dengan yang namanya permasalahan atau problema. Problema/problematika aslinya berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2001 : 276) problema berarti hal yang dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Syukir (1983 : 65) mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.

Dari pengertian di atas bisa dimaknakan bahwa problema adalah segala hal yang menjadi kesulitan yang bisa menjadi hambatan dan membutuhkan pemecahan.

Problematika juga dimaksudkan sebagai kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

### **B. Kompetensi**

Sebagai tenaga professional, guru harus memiliki beberapa kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Di dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 8 tentang

kompetensi dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi : 1] Kompetensi Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian, 2] Kompetensi kepribadian, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia.

Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakat, 3] Kompetensi profesional, kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. 4] Kompetensi sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dalam kajian ini pembahasan akan difokuskan pada kompetensi paedagogik, dan lebih spesifik lagi pada pembahasan tentang kompetensi penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Namun sebelumnya, perlu diperjelas tentang konsep makna kompetensi itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan". Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, hlm. 552-553) dinyatakan kemampuan berasal dari kata

mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup melaksanakan sesuatu). Kemudian kata mampu tersebut mendapatkan awalan ke- dan akhiran-an, sehingga kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Henderson dan Cockburn (1994 : 63) menyatakan kompetensi merupakan kemampuan dan pengetahuan perusahaan yang menjadi dasar pemecahan masalah sehari-hari. Selanjutnya, Grant (1991 : 114) mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya yang berbeda, dengan menggunakan berbagai proses organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Abis Syamsudin (dalam Husdarta, 2011 : 111) menyatakan, kompetensi sebagai suatu penampilan yang rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan penuh kesenangan.

Dari berbagai definisi dan pendapat tentang kompetensi di atas maka yang dimaksud kompetensi adalah segala kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang guru dalam melaksanakan tugas paedagogik dan keprofesionalannya.

Selanjutnya, dalam pembelajaran guru dituntut mampu mempersiapkan dan mendesain pembelajaran sedemikian rupa yang dimulai dari penentuan tujuan pembelajaran yang akurat. Tujuan pembelajaran ini tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan guru memahami Kompetensi Dasar yang kemudian harus diturunkan ke Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Kompetensi ini merupakan kompetensi paedagogik yang merupakan kompetensi pertama yang harus dimiliki guru. Hamid Darmadi (2010 : 21) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik dan berakhlak mulia.

Martinis Yamin dan Maisah (2010 : 9) mengemukakan bahwa Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dialaminya. Sedangkan C. Zafira (2010 : 10) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam memiliki indikator secara esensial, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dengan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

E. Mulyasa (2012 : 77-78) mengemukakan bahwa secara operasional, didalam kompetensi pedagogik kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial diantaranya : 1] Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, dan kompetensi, serta memperkirakan cara mencapainya. 2] Pelaksanaan atau juga disebut implemmentasi adalah proses memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan. 3] Pengendalian atau evaluasi pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru untuk memahami peserta didik serta kemampuan gurudalam mengelola pembelajaran termasuk kemampuan menentukan tujuan pembelajaran yang menjadi target kompetensi peserta didik dengan prinsip kognitif dan kepribadian seorang guru

### **C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)**

Di dalam proses pembelajaran harus ditentukan target kompetensi sebagai siklus

pertama yang ditunjukkan dalam bentuk kompetensi dasar (KD). Namun, kata kerja yang termuat pada KD biasanya belum berbentuk kata kerja operasional, dan karena itu belum dapat diukur atau dinilai. Untuk bisa mengukur atau menilai KD dibutuhkan indikator pencapaian kompetensi (IPK). Apa itu indicator ? Minin Hayati (2007 : 8) memaparkan bahwa Indikator merupakan bagian operasional dan terukur dari kompetensi. Dan kompetensi yang terkecil bentuknya adalah kompetensi dasar. Indikator dikembangkan dan diuraikan dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional (KKO). Tiap kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam dua atau lebih indicator pencapaian kompetensi, utamanya untuk KD dari KI-3. Indikator merupakan acuan dalam menentukan tugas tagihan. Jenis tagihan ini berbentuk ujian atau bentuk lain yang bisa diukur. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan harus kata kerja operasional dan cakupannya lebih terfokus dan lebih sempit dari kompetensi dasar.

Khaerudin (2006 : 129-130) memaparkan Indikator berfungsi sebagai berikut : 1] Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah serta lingkungan. 2] Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. 3] Pedoman dalam

mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal.

Sedang Isdi Susilo (2012, 164-165) menjelaskan Indikator berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD.

Masih menurut Khaerudin, kriteria indikator adalah sebagai berikut : [1] sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik, [2] berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, [3] memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (*life skills*), [4] menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh (kognitif, afektif dan psikomotorik), [5] memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, [6] dapat diukur/dapat dikuantifikasi, [7] memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional, [8] berisi kata kerja operasional (KKO), dan (8) tidak mengandung pengertian ganda (ambigu).

#### D. Problem IPK pada Kompetensi Sikap

Berdasarkan pengalaman penulis mendampingi peserta diklat dalam praktik pembuatan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), masih banyak peserta diklat yang kurang tepat dalam menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Ada beberapa kediklatan yang memungkinkan peserta diklat menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) antara lain : [1] diklat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), [2] diklat evaluasi pembelajaran, [3]

diklat *lesson study* (LS), dan sebagainya. Kesalahan paling dominan adalah [1] kata kerja di indikator pencapaian kompetensi (IPK) tidak operasional sehingga tidak bisa diukur atau dinilai, [2] level kognitif yang dibuat KKO masih sampai di bawah level kognitif yang ada di kompetensi dasar (KD).

Sebagaimana diketahui bahwa pada Kurikulum 2013 revisi ditentukan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang pada kompetensi inti (KI-1 = Kompetensi Sikap Spiritual) dan kompetensi inti (KI-2 = Kompetensi Sikap Sosial) yang memiliki kompetensi dasar (KD) dan ada yang tidak. Mata pelajaran yang KI-1 dan KI-2 nya memiliki KD yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara (PPKn) dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sedang mata pelajaran yang lain tidak memiliki KD untuk KI-1 dan KI-2. Di Kementerian Agama yang termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama yaitu Al-Qur'an Hadits, Aqidah – Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Ketika kompetensi inti (KI) memiliki KD maka memerlukan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Karena itu, untuk mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KD dari KI-1 dan KI-2 bersifat spesifik. Dikatakan spesifik karena sikap yang harus ditanamkan sekaligus dinilai harus selaras dengan yang tertera di KD. Makna KD adalah memuat kompetensi yang dituntut untuk dikuasai peserta didik dan muatan materi pelajaran. Sedang sikap spiritual dan sikap sosial pada mata pelajaran selain PPKn dan Pendidikan Agama bersifat generik. Artinya sikap spiritual dan sikap sosial yang ditanamkan dan dinilai bersifat umum, apapun sikap yang muncul secara alamiah.

1.1 Mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia	2.1 Bersikap peduli terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia
--	--

Contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran PPKn SMP kelas VIII

Dalam memahami kalimat KD-1.1 di atas guru masih gagal menangkap maksudnya. Kegagalan pertama, guru kurang sadar kalau dengan adanya KD seperti itu maka guru harus menanamkan sikap spiritual tersebut sekaligus harus juga menilainya, sehingga di akhir pembelajaran guru melahirkan nilai sikap spiritual. Kegagalan kedua, dengan keharusan guru menanamkan sekaligus menilai sikap spiritual tersebut guru tidak mampu merumuskan kata kerja operasional sebagai IPK yang aplikatif serta operasional untuk bisa dinilai. Sebagaimana panduan penilaian bahwa teknik penilaian sikap khususnya bagi pendidik yaitu observasi atau pengamatan. Tanpa IPK yang jelas maka pembelajaran tidak terarah sekaligus penilaiannya juga tidak akurat.

Dari KD-1.1 di atas guru seharusnya menciptakan aktivitas peserta didik di dalam proses pembelajaran yang dapat diamati berupa mensyukuri terkait kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia. Misalnya menyanyikan lagu wajib nasional "Garuda Pancasila". Jadi, menyanyikan lagu tersebut bagi peserta didik adalah merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat peserta didik menyanyikan lagu tersebut guru mengamati pesertanya seberapa mereka menghayati lagu tersebut dengan keyakinan bahwa lagu tersebut diciptakan juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan Negara Indonesia. Atau juga bisa dengan kegiatan lain yang prinsipnya bisa diamati terkait sikap mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Sementara untuk KD-2.1 guru seharusnya menciptakan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat diamati berupa peduli terkait kedudukan dan

fungsi Pancasila bagi bangsa dan Negara Indonesia. Misalnya membersihkan lambang garuda pancasila baik yang berbentuk ukiran atau gambar, mem-bersihkan gambar naskah pancasila yang ada di dalam kelas, atau menggambar lambang garuda pancasila sebaik mungkin. Ketika peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan tersebut guru membimbingnya sebagai bentuk kegiatan menanamkan sikap peduli sekaligus melakukan pengamatan untuk melahirkan sikap peduli. Atau kegiatan lainnya.

Dengan demikian, KD-1.1 dan KD-2.1 tersebut di atas dapat diturunkan ke dalam IPK sebagai berikut.

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
1.1 Mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia	1.1.1 Menunjukkan sikap bersyukur dengan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul "Garuda Pancasila"
2.1 Bersikap peduli terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia	2.1.1 Menunjukkan sikap peduli dengan cara membersihkan lambang garuda pancasila baik yang berbentuk ukiran atau gambar, membersihkan gambar naskah pancasila yang ada di dalam kelas, atau menggambar lambang garuda pancasila sebaik mungkin.

Dengan terteranya kata kerja operasional pada IPK sebagaimana tabel di atas, maka guru bisa melakukan penanaman sikap spiritual apa dan sikap sosial apa serta menilainya. Dalam hal melahirkan IPK yang seperti ini guru masih banyak yang mengalami kesulitan.

Sedang untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di madrasah terasa lebih sulit lagi dalam menyusun IPK-nya. Hal ini karena mata pelajaran agama di madrasah lebih bersifat transenden yang cenderung abstrak. Karena itu, guru pengampu mata pelajaran agama di madrasah harus lebih keras

lagi berfikir untuk membuat kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Memang membutuhkan kerja pikir yang kuat untuk bisa melahirkan kata kerja operasional (KKO) yang aplikatif dan implementatif. Jadi tidak boleh sembarangan untuk masalah IPK ini. Berikut contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran keagamaan di madrasah.

Contoh KD dari KI-1 dan KI-2 mata pelajaran Fiqh MTs kelas VIII semester genap

1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa	2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah puasa
------------------------------------	--

Di dalam Model Penilaian Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama RI Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Pendidikan Islam tahun 2014 diterakan bahwa sikap spiritual itu ditunjukkan hanya dengan dua kompetensi yaitu *menghargai* dan *menghayati* tentang ajaran agama yang dianut. Sedang untuk sikap sosial terdiri dari tujuh kompetensi yaitu : jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri.

Sementara ranah sikap pada Juknis Penilaian Hasil Belajar Pendidik Kementerian Agama nomor 5161 diberikan tingkatan sikap dan deskripsinya mulai dari [a] menerima nilai, [b] menanggapi nilai, [c] menghargai nilai, [4] menghayati nilai, dan [5] mengamalkan nilai.

Tingkatan dan deskripsi ranah sikap ini tentu diharapkan membantu guru untuk menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Namun begitu, jika dicermati deskripsi yang ditampilkan tersebut tetap saja tidak mudah dipahami oleh para guru jika digunakan untuk menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Apalagi ada KD pada KI-1 dan KI-2 yang ternyata tidak sesuai dengan bunyi tingkatan sikap seperti contoh mata pelajaran Fiqh di atas. Jadi para guru benar-benar keberatan menyusun Indikator

Pencapaian Kompetensi (IPK) terutama untuk kompetensi sikap ini.

Kembali kepada prinsip bahwa jika pada kompetensi inti (KI) ada KD-nya maka menuntut adanya Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) sebagai media penanaman sikap yang juga harus dilakukan penilaiannya. Untuk itu guru perlu menciptakan aktivitas peserta didik untuk sarana menanamkan sikap yang dapat diamati untuk bahan penilaian pada saat proses pembelajaran. Ketika deskripsi atas masing-masing tingkatan nilai tersebut juga kurang konkrit dan kurang operasional maka menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) nya. Karena itu dibutuhkan kemampuan ijtihad para guru untuk bisa melahirkan KKO sendiri sebagai bahan menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

Dari contoh KD-1.3 dan KD-2.3 mata pelajaran Fiqh kelas VIII tersebut bisa dilahirkan alternatif IPK sebagai berikut.

1.3 Menghayati hikmah ibadah puasa	1.3.1 Mengungkapkan apresiasi yang positif terhadap tayangan video orang yang kelaparan
2.3 Memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah puasa	2.3.1 Memberikan infaq dari uang sakunya untuk diberikan kepada kaum dzuafa di sekitar madrasah / sekolah sebagai implementasi pemahaman tentang hikmah puasa

Dengan dilahirkannya IPK sebagaimana tabel di atas maka guru menjadi jelas sikap apa yang ditanamkan sekaligus dinilai selama atau pada saat proses pembelajaran berlangsung yaitu untuk sikap spiritual berupa apresiasi yang positif setelah menyaksikan tayangan video orang yang kelaparan, dan untuk sikap sosialnya berupa aktivitas konkrit meninfaqqkan sebagian uang sakunya untuk diberikan kepada kaum dzuafa' di sekitar sekolah / madrasah.

### **E. Problem IPK pada Kompetensi Pengetahuan**

Untuk Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KD dari KI-3 yang merupakan kompetensi pengetahuan, problem umumnya terlentang pada tidak sesuainya KKO pada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang disusun oleh guru dengan bunyi KD. Sebagaimana diketahui bahwa jenis Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ada tiga tingkatan yaitu : [a] indikator penunjang, adalah indikator yang menjadi batu loncatan/prasyarat untuk mencapai indikator inti; [b] indikator inti, adalah indikator yang KKO-nya selevel dengan kata kerja pada KD, indikator ini wajib dibuat indikator soal-nya; dan [c] indikator pengembangan, adalah indikator ini memiliki KKO minimal selevel dengan kata kerja pada KD. Indikator ini diperuntukkan bagi pembelajaran pengayaan atau juga soal tipe HOTS.

Ada beberapa problem dalam pembuatan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KI-3 ini, yaitu [1] kata kerjanya belum operasional. Masih sering dijumpai Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang seharusnya sudah dapat diukur dan dinilai tetapi masih menggunakan kata kerja yang sama dengan kata kerja yang ada di KD. Misalnya di KD tertera kata 'memahami' tetapi di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) juga masih memakai kata 'memahami'. Sedang kata kerja memahami ini belum bisa diukur.

[2] Tidak selaras antara tuntutan KD dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang dibuat oleh guru. Misalnya di KD tertera kata 'menerapkan' tetapi di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) juga masih memakai kata 'menyebutkan'. Jadi bisa dikatakan kalau Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) tidak mengukur KD. [3] Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang buat oleh guru masih di bawah level yang menjadi tuntutan KD. Misalnya di KD tertera kata 'menganalisis'

tetapi di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) memakai kata 'menyebutkan' atau 'menjelaskan pengertian'. [4] Guru tidak mampu menangkap muatan materi yang terkandung di dalam KD. Sebagaimana diketahui bahwa substansi sebuah KD adalah berisi kompetensi yang dituntutkan kepada peserta didik dan muatan materi. Artinya di dalam KD tersebut tercakup keluasan materi. Keluasan materi ini akan berpengaruh kepada berapa jumlah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Keluasan materi yang sempit membutuhkan jumlah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang sedikit. Jika muatan materinya luas maka membutuhkan jumlah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang banyak. Ini masih sering ditemukan ada materi yang bersifat substantive dari KD tersebut tetapi malah tidak tercover di Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

Problem-problem penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada KD dari KI-3 tersebut bisa dibuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnul Ika Sandra - widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya- pada bulan Oktober - November 2018 terhadap peserta sebanyak 35 sebagai responden dengan hasil sebagai berikut. Untuk komponen kesesuaian dan ketepatan penggunaan kata kerja operasional aspek pengetahuan dengan KD memperoleh skor rata-rata 77,14 %. Untuk komponen menggambarkan lingkup materi dalam KD pengetahuan dengan skor rata-rata 77,14 %. Yang memperoleh skor lumayan tinggi karena mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami yaitu komponen kecukupan jumlah indikator aspek pengetahuan dengan memperoleh skor rata-rata 91,43 %. [5] Banyak guru yang terjebak pada contoh KKO dari taksonomi Anderson yang sering beredar. Terjebak disini maksudnya guru terlalu terpaku untuk menggunakan KKO yang ada dan tidak berani keluar dari taksonomi tersebut. Padahal KKO yang ada di tabel taksonomi tersebut terdapat banyak kata

kerja yang sama dari level kognitif yang berbeda. Misalnya, ada KKO berupa kata 'menjelaskan' yang terdapat pada level kognitif pemahaman dan level kognitif pengetahuan. Taksonomi Anderson yang biasa beredar tersebut masih menyulitkan guru dipakai untuk membuat KKO pada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

#### **F. Problem IPK pada Kompetensi Keterampilan**

Kompetensi keterampilan pada Kurikulum 2013 merupakan implementasi atau penerapan dari kompetensi pengetahuan. Artinya peserta didik setelah menguasai kompetensi pengetahuan (KI-3) harus dilanjut untuk mampu menguasai atau terampil menerapkan dari apa yang dikuasai pada kompetensi pengetahuan. Karena itu, KD dari KI-4 sudah lebih operasional dibanding KD dari KI-3. Dan bahkan bisa jadi tidak perlu kata kerja operasional lagi. Hanya saja guru tetap harus membuat Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Indikator pencapaian kompetensi keterampilan merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan atau proses yang berkontribusi/ menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Jadi, kompetensi keterampilan ini sifatnya kelanjutan dari telah dikuainya kompetensi pengetahuan maka Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)-nya lebih ke arah implementasi dari kompetensi pengetahuan ke dalam kegiatan sehari-hari. Dengan catatan bahwa masing-masing mata pelajaran memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya kompetensi keterampilan pada mata pelajaran matematika sangat berbeda dengan keterampilan kebanyakan mata pelajaran yang lain. Pada mata pelajaran matematika kegiatan menyelesaikan soal tertentu bisa merupakan kompetensi keterampilan meskipun tampak seperti

kompetensi pengetahuan. Problem dalam menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pada kompetensi keterampilan ini antara lain adalah [1] guru tidak mampu memberikan tugas atau menciptakan kegiatan kepada peserta didik dalam sebuah kalimat Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang implementatif. [2] Karena kesalahan di poin [1] maka problem berikutnya yaitu tidak mampu menyusun rubrik penilaian dengan sempurna. Yang harus dipahami tentang kompetensi keterampilan (KI-4) ini adalah bahwa KD ini selayaknya dilaksanakan ketika kegiatan pembelajaran KD dari KI-3 telah berakhir. Kecuali jika KI-4 tersebut memiliki KD lebih dari satu yang menggambarkan luasnya materi yang tercakup.

Problem penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) untuk kompetensi keterampilan juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang dari widyaiswara BDK Surabaya Kusnul Ika Sandra di atas untuk komponen kesesuaian dan ketepatan penggunaan kata kerja operasional aspek ketrampilan dengan kompetensi dasar diperoleh skor rata-rata 77,14 %. Juga untuk komponen menggambarkan lingkup materi dalam KD pengetahuan dengan skor rata-rata 77,14 %. Prosentase tersebut merupakan indikasi kalau kemampuan guru sebagai peserta diklat dalam menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) masih ada yang kurang bagus. Yang memenuhi kompetensi bagus adalah komponen kecukupan jumlah indikator aspek ketrampilan memperoleh skor rata-rata 91,43 %.

#### **G. Efek terhadap pembelajaran dan penilaian**

Efek dari tidak standarnya penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ini adalah [1] pembelajarannya tidak terarah. Hal ini karena guru tidak punya target kompetensi yang mau dikuasakan kepada peserta didik. Kompetensi apa yang mau diupayakan untuk dikuasai peserta didik menjadi tidak jelas dan tidak terukur. Efek turunannya adalah materi-

nya juga tidak jelas mana yang seharusnya disampaikan kepada peserta didik. Jika materinya tidak jelas maka pendekatan, model, dan metode pembelajarannya tidak jelas. Begitu juga medianya menjadi tidak jelas karena kurang maksimal dalam melakukan desain pembelajarannya. [2] Penilaiannya tidak jelas. Karena target kompetensi yang akan dikuasakan kepada peserta didik tidak jelas maka apa yang mau diukur atau dinilai ikut tidak jelas. Ketentuan dasarnya bahwa setiap Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang sudah dibuat maka wajib diukur atau dinilai. Pengukuran dan penilaian ini digunakan untuk melihat apakah target kompetensi yang berusaha dikuasakan kepada peserta didik sudah tercapai atau belum. Dengan diketahuinya hasil pengukuran dan penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ini yang dikorelasikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka diketahui apakah seorang peserta didik telah tuntas atau belum. Bagi peserta didik yang sudah tuntas maka perlu diberikan pengayaan dan bagi peserta didik yang belum tuntas maka diberikan pembelajaran ulang (*remedial*).

#### H. Peran Widyaiswara dalam Kediklatan

Dari hasil penelitian di atas dan dikaitkan dengan pengalaman penulis bisa dimaknai bahwa problem kesulitan guru dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang paling dominan adalah ada pada dua komponen atau aspek yaitu aspek menentukan kata kerja operasional (KKO) dan aspek ketepatan lingkup materi. Dari fakta-fakta di atas maka menjadi tugas para widyaiswara untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan kediklatan. *Pertama*, widyaiswara sebaiknya lebih *aware* terhadap masalah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ini bagi para guru yang sedang mengikuti diklat. Lakukan pengecekan terhadap kompetensi penyusunan Indikator Pencapaian

Kompetensi (IPK) dengan cara praktik. Praktik penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dimulai dengan cara setiap guru peserta diklat diminta mengambil satu paket kompetensi dasar (KD) sesuai mata pelajaran yang diampu dengan jenjang pendidikan dan kelas tertentu. *Kedua*, lakukan pencermatan sekaligus analisis apakah hasil pekerjaan guru dalam penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) sudah memenuhi standar ketepatan apa belum. Ketiga, jika ada Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tidak tepat maka widyaiswara perlu melakukan pembimbingan dengan seksama sampai guru peserta diklat paham dengan sebenar-benarnya. Keempat, untuk menguatkan pemahaman para guru peserta diklat widyaiswara bisa memerintahkan kerja kelompok. Tujuan kerja kelompok antara lain adalah adanya kesempatan saling sharing antara antar peserta diklat sehingga saling mengasah kognisi mereka. Dengan kerja kelompok maka anggota kelompok bisa lebih leluasa bertanya jawab tanpa adanya beban mental di antara mereka sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan sharing kepada widyaiswara. Kelima,

#### PENUTUP

##### A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan; [1] bahwa masih banyak guru yang belum menguasai atau mengalami kesulitan/problema tentang penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK); [2] problema yang paling dominan ada di dua hal yaitu (a) kesesuaian dan ketepatan penggunaan kata kerja operasional baik pada aspek pengetahuan maupun aspek ketrampilan dengan kompetensi dasar (KD), dan [2] komponen lingkup materi dalam KD baik aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan; [3] problema penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) akan berpengaruh terhadap desain pembelajaran yang melibatkan model dan metode pembelajaran yang tidak tepat; [4] widyaiswara memiliki tanggung jawab

dan peran yang penting dalam kediklatan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat yang notabene adalah guru dalam menyusun Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

#### B. Rekomendasi

Dari kajian di atas maka penulis menyampaikan saran kepada; [1] para guru untuk

menjadikan perhatian khusus dan serius tentang penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK); [2] para widyaiswara untuk lebih teliti dalam melakukan dikjartih terkait tentang penyusunan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK); [3] Balai Diklat Keagamaan atau lembaga kediklatan yang lain untuk menjadikan program diklat tentang Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) ini. [α]

#### Daftar Pustaka

- Darmadi, Hamid. 2010. *Kemampuan Dasar Mengajar*. Bandung: Alfabeta
- Debdikbud.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Grant, R.M.. 1991. *The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation*. California Management Review, spring
- Henderson R. and I. Cockburn. 1994. *Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Phramaceutical Research*.Strategic Management Journal, Vol.15, No.2
- Husdarta. 2011. *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung: Alfabeta
- Isdi Susilo. 2012. *Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran*. Jakarta : Kata Pena
- Khaerudin.2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. M i n i n
- Haryati 2007. *Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Mulyasa, E. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Yamin, Martinis dan Maisah.2010. *Standarisasi Kinerja guru*.Jakarta: Gp press
- Zafira, C. 2010. *Pedoman Standarisasi Kompetensi Guru*. Jakarta: Panca Bakti

ISSN 1978 - 4953

# INOVASI

Jurnal Diklat Keagamaan

Volume 13, No. 2, Pebruari - Maret 2019

Jurnal **Inovasi** terbit tiga bulan sekali, Redaksi menerima tulisan dalam bidang pendidikan dan pelatihan berupa artikel, makalah, hasil penelitian atau resensi buku. Tulisan yang dikirimkan merupakan gagasan orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media manapun. Panjang tulisan antara 15-25 halaman kertas A4, spasi 1,5 disertai abstrak dalam bahasa Inggris (untuk artikel berbahasa Indonesia; dan abstrak dalam bahasa Indonesia untuk artikel berbahasa Inggris). Naskah diserahkan dalam bentuk *file*. Khusus untuk laporan penelitian, sistematika tulisan harus menggambarkan tahapan-tahapan penelitian dengan jelas. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Tulisan yang dimuat akan mendapat penghargaan. Pengiriman artikel bisa dialamatkan ke [journalinovasi2019@gmail.com](mailto:journalinovasi2019@gmail.com) atau Web journal inovasi : [bdksurabaya.e-journal.id](http://bdksurabaya.e-journal.id)

#### **PENANGGUNG JAWAB :**

Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya  
Dr. H. Muchammad Toha, M.Si

#### **MITRA BESTARI :**

Prof. Dr. H.M. Ali Haidar, MA (Sosiologi Agama/Keagamaan - Univ. Negeri Surabaya)  
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si (Sosiologi Pendidikan, Dewan Pendidikan Jawa Timur)  
Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D (Pendidikan Islam - UIN Sunan Ampel)  
Dr. Warsiman, M.Pd (Pendidikan Bahasa Indonesia - Univ. Brawijaya Malang)

#### **REDAKTUR :**

Dr. H. Widayanto, M.Pd  
Danang Eka Sandi, S.Sos  
Drs. Machzudi, M.Si  
Dr. H. Muslimin, M.M.

#### **EDITOR :**

Zainul Arief, SH., M.H  
Drs. Sutowijoyo, M.Pd  
Dr. H. M. Musfiqon, M.Pd  
Miftahussirojudin, S.Ag., M.M  
Drs. H. Sholikin, M.Ed

#### **DESAIN GRAFIS :**

Drs. H. Khamim Thohari, M.Ed

#### **SEKRETARIAT :**

Heni Mardiningsih, SE., M.M  
Yogi Kerry Ananda, S.Kom  
M. Anung Edy Nugroho, SE.,M.S.M

#### **PENERBIT :**

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

#### **ALAMAT REDAKSI & TATA USAHA :**

Jl. Ketintang Madya 92 Surabaya  
Telp. (031) 8280116, 829249 Fax. (031) 8290021  
E-mail : [inovasi.bdksurabaya@gmail.com](mailto:inovasi.bdksurabaya@gmail.com)

#### **LAY OUT & CETAK :**

Perc. alpha Telp. 031 532 7639, 081 5501 3123  
E-mail : [alpha\\_sby@yahoo.com](mailto:alpha_sby@yahoo.com)

---

---